

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan salah satu program unggulan Departemen Pertanian dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan modal dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-PUAP), melalui kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Nagari (Desa). Hal ini dilakukan pemerintah karena berdasarkan umpan balik dari bawah, masalah utama dalam menjalankan usaha ekonomi petani dalam sistem usaha agribisnis yaitu: 1) sulitnya masyarakat mengakses permodalan, 2) lemahnya modal masyarakat terutama masyarakat kategori miskin/petani kecil. Tujuan dari program yaitu (1) Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah (2) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani (3) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis (4) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Selain itu dalam pedoman tersebut bentuk dari sasaran Program PUAP Dalam program PUAP ini, ada empat hal yang menjadi sasaran sebagai berikut: 1) Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin sesuai dengan potensi pertanian desa. 2) Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola

oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi; 3) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; 4) Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha. Berdasarkan uraian hasil penelitian wawancara peneliti dengan informan dan dokumentasi peneliti terkait implementasi Program PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta pembahasan mengenai permasalahan dikaitkan dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan implementasi Program PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah tercapai namun belum maksimal dibuktikan dengan kinerja implementasi Program PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum sudah berjalan dengan baik, implementor sudah melaksanakan kegiatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap standar dan sasaran dari Program PUAP. Dari indikator jelas dan terukur, Program ini berdasarkan pedoman pelaksanaannya sudah jelas dan terukurnya program ini, itu dibuktikan dengan arah kegiatan yang berupaya untuk mencapai tujuan dan adanya kegiatan untuk mencapai tujuan dan terimplementasinya program ini di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan tujuan dari Program PUAP peneliti menemukan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang sejak diimplementasikannya program ini, kemampuan pelaku usaha agribisnis sudah meningkat, kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan usaha agribisnis sudah meningkat. Semua itu dibuktikan bahwa adanya perbedaan

ketika program ini belum diimplementasikan dengan sesudah program ini diimplementasikan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumberdaya khususnya sumberdaya manusia sudah mencukupi untuk melakukann kegiatan Program PUAP, dikarenakan secara kuantitas dan kualitas dari sumberdaya manusianya sudah memadai untuk menjalankan Program PUAP. Sedangkan anggaran yang ada untuk saat ini belum mendukung dalam keberlanjutan kegiatan Program PUAP baik itu dari implementor maupun kelompok sasaran mengakibatkan beberapa LKM-A mati suri. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk menjalankan program ini juga masih kurang seperti kepemilikan kantor dan peralatan lain yang digunakan dalam menjalankan Program PUAP.

3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator koordinasi sudah bisa dikatakan berjalan baik. Pada indikator komunikasi juga berjalan baik mulai dari komunikasi vertikal maupun horizontal pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Sedangkan pada indikator koordinasi peneliti menemukan tidak adanya kendala yang begitu berarti dalam menjalankan Program PUAP. Dalam hal ini peneliti melihat koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada variabel karakteristik agen pelaksana tidak ditemui kendala yang begitu penting, indikator norma-norma masih berlakunya aturan yang diterapkan pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dan masih berlakunya sanksi ketika ada yang melanggar aturan tersebut membuat kinerja implementor menjadi baik. Selain itu pada indikator struktur organisasi yang cukup baik karena memiliki rentang kendali yang tidak begitu luas karena hanya satu dinas yang bertanggung jawab dengan program ini sehingga informasi/pesan sampai dengan cepat dan mudah dilakukannya kegiatan pada Program PUAP. Pada indikator pola hubungan yang terjadi sudah berjalan dengan baik, tidak ditemukannya kendala yang begitu berarti dalam menjalankan hubungan antara Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan dengan OPD lainnya.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam variabel kondisi sosial, ekonomi dan politik masih ditemukannya banyak kendala antara lain: pada lingkungan ekonomi yaitu adanya sikap dari kelompok sasaran yang masih belum sadar dengan kewajiban membayar utang dan masih adanya stigma yang beredar dalam masyarakat bahwa dana PUAP merupakan dana hibah dari pemerintah yang ditujukan pada masyarakat miskin dan tidak perlu dikembalikan. Namun yang menjadi kendala pada kelompok sasaran di beberapa desa penerima dana PUAP. Beberapa dari LKM-A memiliki masalah internal dalam kepengurusannya dan masalah dengan nasabah/anggotanya yang susah membayar utangnya, ini akan menyebabkan LKM-A menjadi sulit untuk berkembang, dan bagi LKM-A yang mampu mengatasi masalah tersebut akan mampu menjadi

LKM-A yang lebih maju. Disini peran implementor Program PUAP harusnya bisa meminimalisir dan mencari jalan keluar dari LKM-A tersebut. Untuk dukungan sosial di Nagari penerima Program PUAP menerima program ini dan merasakan dampak dari diimplementasikannya program ini di Nagari mereka. Itu bisa dilihat dari adanya perubahan ketika program ini belum diimplementasikan dan setelah program ini diimplementasikan. Untuk dukungan politik juga sudah dilakukan dengan adanya misi Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan dalam RPJMD yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemamfaatan potensi daerah. Dalam mewujudkan RPJMD tersebut salah satu upaya untuk mencapainya yaitu dengan Program PUAP. Ketika program ini berusaha mewujudkan tujuannya secara langsung dan tidak langsung akan berakibat pada proses mewujudkan misi yang ada dalam RPJMD di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Disposisi Implementor

Bedasarkan hasil penelitian bahwa implementor memahami bagaimana mengimplementasikan Program PUAP dan mempunyai komitmen untuk mewujudkan tujuan dari Program PUAP. Pada indikator intensitas disposisi implementor, peneliti menyimpulkan bahwa implementor menerima untuk menjalankan kegiatan Program PUAP. Peneliti juga menemukan bahwa implementor merespon dengan positif untuk melaksanakan Program PUAP.

1.2 Saran

Dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja Program PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota, peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor atau instansi yang terlibat untuk dipertimbangkan antara lain:

1. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan selaku implementor dari program PUAP hendaknya mampu mempertahankan LKM-A yang masih aktif dan berprestasi, dan juga hendaknya mampu menghidupkan dan mencari solusi bagi LKM-A yang mengalami masalah dan mati suri, sehingga LKM-A yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu berkembang dan bertahan disetiap desa/nagari.
2. Pemerintah Daerah lebih memperhatikan lagi sumberdaya finansial dan Sarana Prasarana untuk menjalankan Program PUAP, karena peneliti menemukan banyak LKM-A di Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan bantuan penguatan modal maupun fasilitas berupa perlengkapan terkait program PUAP untuk kebutuhan LKM-A itu sendiri.
3. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan mampu mendeteksi dan mencari solusi apa yang menjadi masalah bagi LKM-A yang tidak aktif. Karena peneliti menemukan bahwa yang menjadi masalah bukan hanya kesadaran dan mental masyarakat petani yang mengakibatkan terjadinya kredit macet pada LKM-A, tetapi masalah potensi pertanian dan perekonomian di Nagari penerima Program

PUAP juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan suatu LKM-A.

4. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Jurusan Administrasi Publik dan menambah referensi kebijakan publik khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik, peneliti sadar bahwa hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Bagi penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan ada dilakukanya penelitian mengenai program ini khususnya mengenai manajemen pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan.

